

China's Foreign Policy Toward India's Internet Censorship In The Galwan Valley Conflict

Salmiati¹

¹School of International Studies & Diaspora, Gujarat University
Email: ammysalmiatialam@gmail.com

Asma Amin²

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat
Email: asmaamin.hi06@gmail.com

Wandi Abbas³

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politikSosiالنiversitas Sulawesi Barat
Email: wandi@unsulbar.acid

Abstract

Nowadays, the need for the internet is increasing as seen from China and India as the countries with the world's largest population and the world's largest internet users. In this study, entitled "China's Foreign Policy Toward India's Internet Censorship In The Galwan Valley Conflict", the researcher aims to find out how China's foreign policy strategy responds to internet censorship by India. This study uses the concepts of foreign policy, cyber attack and cyber security. This research is a descriptive research that uses literature studies and utilizes primary and secondary data obtained through interviews, articles, journals, documents, reports and various other media which are analyzed qualitatively. China's response to internet censorship carried out by India is that the internet censorship policy for applications is a discriminatory act that violates WTO regulations and the application of internet censorship abuses WTO exceptions on the basis of national security. So far both countries have focused on border issues in which China's foreign policy is focused on critical border issues with India, preventing total hostilities with India and still making India a partner country. The foreign policy strategy undertaken by China to achieve its national interests with India is to carry out negotiations and consultations through the diplomatic and military of the two countries and until negotiations and consultations regarding the border are still ongoing.

Keywords: China, Cyber Attack, Cyber Security, Internet Censorship, India

Abstrak

Dewasa ini, kebutuhan internet semakin meningkat dilihat dari negara China dan India sebagai negara dengan penduduk terbesar dunia dan pengguna internet terbesar dunia. Dalam penelitian ini, yang berjudul "China's Foreign Policy Toward India's Internet Censorship In The Galwan Valley Conflict" peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan luar negeri China dalam menanggapi internet censorship yang dilakukan oleh India. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri, *cyber attack* dan *cyber security*. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang menggunakan studi literatur dan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, artikel, jurnal, dokumen, laporan dan berbagai media lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Tanggapan China terhadap *internet censorship* yang dilakukan oleh India adalah kebijakan *internet censorship* terhadap aplikasi merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar peraturan WTO dan pemberlakuan *internet censorship* menyalagunakan

pengecualian WTO atas dasar keamanan nasional. Sejauh ini kedua negara berfokus pada permasalahan perbatasan di mana kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh China adalah fokus pada permasalahan kritis perbatasan dengan India, mencegah permusuhan total dengan India dan tetap menjadikan India sebagai negara mitra. Strategi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh China untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan India adalah melakukan negosiasi dan konsultasi melalui diplomatik dan militer kedua negara dan sampai pada saat negosiasi dan konsultasi terkait perbatasan masih berlangsung.

Kata Kunci: China, *Cyber Attack*, *Cyber Security*, *Internet Censorship*, India

PENDAHULUAN

China dan India merupakan dua negara besar di kawasan Asia yang memiliki hubungan kompleks, terutama di sepanjang perbatasan mereka di pegunungan Himalaya. Meskipun hubungan diplomatik antara kedua negara ini sudah terjalin sejak 1 April 1950 dan didasarkan pada prinsip-prinsip damai yang dikenal dengan *Pancsheel*, terdapat banyak ketegangan yang muncul akibat sengketa perbatasan yang belum terselesaikan (Weidong, 2020). Salah satu konflik yang paling menonjol adalah konflik di Lembah Galwan yang merupakan bagian dari sektor *Barat Line of Actual Control* (LAC), sebuah wilayah yang diklaim oleh India tetapi dikendalikan oleh China (Pranoto, 2018).

Pada tanggal 15 Juni 2020, terjadi bentrokan berdarah di Lembah Galwan yang menewaskan 20 tentara India, sebuah insiden yang menandai peningkatan signifikan dalam ketegangan antara kedua negara setelah beberapa dekade (Ghosh, 2020). Bentrokan ini menjadi pemicu utama bagi India untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap China, termasuk penyensoran terhadap 59

aplikasi seluler asal China pada 2 Juni 2020 sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan dari sisi keamanan siber (Ghosh, 2020).

Kemudian pada tanggal 2 September 2020 India kembali memblokir aplikasi sebanyak 118 aplikasi hal tersebut dilakukan berdasarkan pada aturan pasal 69A undang-undang teknologi informasi India. Kemudian pada bulan September, di mana India kembali memblokir aplikasi seluler sebanyak 43 aplikasi. Tindakan yang diambil oleh pemerintah India atas dasar aplikasi tersebut terlibat dalam kegiatan yang merugikan kedaulatan, integritas, pertahanan, keamanan dan ketertiban umum di India (Bureau, 2020).

Pemblokiran aplikasi-aplikasi China tersebut diperkuat dengan alasan kerentanan keamanan India apalagi sejak terjadi bentrokan di Lembah Galwan pada Mei 2020, kelompok peretas China secara teratur menargetkan perusahaan sektor publik dan perusahaan teknis India melalui pelanggaran keamanan cyber. Kemudian setelah bentrokan di

Lembah Galwan, kelompok peretas China yang dikenal dengan RedEcho mencoba menargetkan jaringan dan pelabuhan sektor tenaga listrik India. Grup RedEcho tersebut merupakan bagian daripada unit intelijen militer China. Peretas tersebut mencoba menembus keamanan pusat pengiriman beban listrik regional di seluruh Kawasan India Tengah yang bertanggungjawab atas pengoperasian jaringan listrik melalui keseimbangan pasokan dan permintaan listrik. Peretasan tersebut melakukan spionase yang akan digunakan untuk eskalasi di masa depan jika kedua negara terus behadapan.

India merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar kedua di dunia, dengan total pengguna mencapai 636 juta orang pada tahun 2021, setelah China yang menduduki peringkat pertama dengan 854 juta pengguna internet pada tahun yang sama (Statista, 2022). India yang merupakan negara terpadat kedua di dunia dengan penduduk sebanyak 1,37 miliar orang, dari sekian penduduk India lebih dari separuh penduduknya terdiri dari generasi bangsa di bawah usia 25 tahun sebagai generasi bangsa ponsel pintar adalah sumber utama bagi pengguna internet. Ketersediaan data yang terjangkau serta harga ponsel pintar yang memadai dengan harga yang bersahabat maka para pengguna ponsel mengkonsumsi layanan internet yang banyak baik melalui website maupun

Ketersediaan aplikasi yang memadai seperti aplikasi penonton video menyebabkan banyaknya generasi bangsa yang mengakses aplikasi tersebut. Apalagi India merupakan negara pengguna TikTok terbesar pada tahun 2020 Sebanyak 99,8 juta. Hal yang menarik adalah pada tahun 2019 aplikasi TikTok diunduh sebanyak 611 juta kali di India sebelum blokade aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah India atas dasar aplikasi tersebut mempromosikan konten yang tidak senonoh (Vardhman, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara konflik fisik di perbatasan dengan serangan siber yang dilakukan oleh China. Berdasarkan berbagai laporan dan penelitian terdahulu, serangan siber yang dilakukan oleh China sering kali merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat posisi geopolitiknya dan melemahkan lawan-lawannya, termasuk India (Singh, 2020). Konflik di Lembah Galwan menjadi salah satu contoh bagaimana ketegangan fisik dapat bereskalasi menjadi konfrontasi di ranah siber, di mana kedua negara saling menyerang infrastruktur kritis satu sama lain.

Berdasarkan permasalahan diatas

maka penulis dalam hal ini bertujuan untuk menjelaskan “bagaimana strategi kebijakan luar negeri China dalam menanggapi internet censorship yang dilakukan oleh India dalam konflik Lembah Galwan?”. Tulisan ini lebih berfokus kepada strategi kebijakan luar negeri China dalam menanggapi internet censorship yang dilakukan oleh India.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sanskar Dubey, Penelitian ini mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah India selama sengketa perbatasan dengan China, khususnya tindakan melarang 59 aplikasi China yang diduga mentransmisikan data pribadi pengguna India secara ilegal. Langkah ini diambil untuk menjaga integritas, keamanan, dan kedaulatan negara, meskipun Pasal 19(1)(a) Konstitusi India menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi. Pemerintah, menggunakan wewenang yang diberikan oleh Pasal 69A, bertindak untuk melindungi data pengguna yang dianggap sebagai aset penting, terutama dalam konteks konflik perbatasan yang semakin memanas.

Penelitian kedua oleh Devdutta Mukhopadhyay dimana Penelitian ini menyoroti kompleksitas sensor internet di India dan bagaimana peraturan dan kebijakan yang ada dapat disalahgunakan. Mukhopadhyay memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pola

dan dampak dari pemadaman internet dan pemblokiran situs web, serta menawarkan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan sensor internet untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berinternet (Mukhopadhyay,2020).

Penelitian berjudul “Internet Censorship in India” oleh Vani Agral & Priyanshi Sharma, penelitian ini menjelaskan internet censorship dari perspektif Cyber security di mana Censorship internet di India dikelola oleh pemerintah pusat dan negara bagian untuk mengontrol akses konten tertentu. Alasan sensor bervariasi dari keamanan nasional hingga perlindungan anak dan privasi data. Metode sensor meliputi penyaringan header dan konten TCP/IP, manipulasi DNS, penyaringan proxy HTTP, serangan DoS, pengawasan, dan teknik sosial. Insiden sensor termasuk pemadaman internet di Jammu, Kashmir, Manipur, dan Nagaland. Sensor ini penting untuk keamanan dan stabilitas nasional, meskipun melanggar kebebasan individu (Vani Agral & Priyanshi Sharma,2019).

Internet Censorship in India

oleh Vani Agral & Priyanshi Sharma., penelitian ini menjelaskan terkait dengan perspektif Cyber security di mana Censorship internet di India dikelola oleh pemerintah pusat dan negara bagian untuk mengontrol akses konten tertentu. Alasan sensor bervariasi, dari keamanan nasional hingga perlindungan anak dan privasi data. Metode sensor meliputi penyaringan header dan konten TCP/IP, manipulasi DNS, penyaringan proxy HTTP, serangan DoS, pengawasan, dan teknik sosial. Insiden sensor termasuk pemadaman internet di Jammu, Kashmir, Manipur, dan Nagaland. Sensor ini penting untuk keamanan dan stabilitas nasional, meskipun melanggar kebebasan individu (Agrawal & Sharma, 2019).

Penelitian dengan judul "Strategi Soft Balancing India dalam pemblokiran aplikasi Cina oleh Baqi A. M. dengan hasil penelitian keputusan India untuk melarang 267 aplikasi Tiongkok di tengah eskalasi sengketa perbatasan Ladakh mewakili manuver strategis yang signifikan yang dibentuk oleh prinsip-prinsip teori penyeimbangan lunak dan sanksi ekonomi. Langkah ini sejalan dengan tujuan strategis India untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Tiongkok dan membangun ekosistem digital yang lebih mandiri. Dengan mengadopsi langkah-langkah untuk mempromosikan aplikasi lokal dan meluncurkan inisiatif untuk mendukung

inovasi, India bertujuan untuk menegaskan otonomi strategisnya di ranah digital sambil menunjukkan tekadnya untuk mengatasi disparitas ekonomi dan teknologi dengan Tiongkok (Baqi, 2022).

Penelitian dengan judul "TikTok Politics : Tit for Tat on the India - China Cyberspace Frontier oleh Mishra M., dkk. di mana larangan terhadap TikTok di India di tengah sengketa perbatasan dengan Tiongkok pada tahun 2020 menyoroti interaksi yang rumit antara teknologi, geopolitik, dan keamanan nasional. Tindakan ini, bersamaan dengan larangan terhadap aplikasi seluler Tiongkok lainnya, tidak hanya menegaskan kekhawatiran segera mengenai privasi pengguna dan keamanan cyber, tetapi juga mengangkat isu-isu lebih luas tentang regulasi konten di platform media sosial dan peralatan telekomunikasi ke permukaan. Larangan tersebut mencerminkan keseimbangan yang rumit yang harus dijaga oleh pemerintah antara memanfaatkan manfaat konektivitas digital dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh platform milik asing. Selain itu, hal ini menekankan pentingnya privasi data dan keamanan cyber dalam era yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik. Wawancara dengan pembuat kebijakan, akademisi,

dan perwakilan industri, serta analisis linguistik komputasional terhadap pos Twitter, mengungkapkan sentimen nasionalis yang kuat di kalangan pengguna India dan kompleksitas geopolitik yang mendasari larangan TikTok. Pada akhirnya, larangan TikTok melambangkan bagian kecil dari dialog lebih luas mengenai regulasi media sosial, keamanan cyber, dan kedaulatan nasional dalam era digital, yang menekankan perlunya kerangka regulasi yang kuat untuk menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh platform milik asing dan melindungi kepentingan nasional dalam dunia yang semakin terhubung oleh teknologi (Mishra, Yan & Schroeder, 2022).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan adalah penelitian ini fokus pada sensorship aplikasi China atas konflik India-China di Lembah Galwan, dengan penekanan pada keamanan nasional, internet censorship, dan dampaknya terhadap hubungan kedua negara. Peneliti memberikan konteks sejarah dan politik yang mendalam terkait konflik ini, serta analisis tentang dampaknya terhadap keamanan nasional India, regulasi internet, dan respons China terhadap tindakan India.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe

penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemblokiran aplikasi China oleh pemerintah India, guna mengetahui bagaimana strategi kebijakan luar negeri China dalam menanggapi fenomena tersebut. Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan studi literatur.

Wawancara dilakukan dengan Niraj Kumar Singh, seorang profesional cyber security red teaming India di Ernst & Young, dan Marsma TNI R. Tjahjo Khurniawan, Direktur Poltek Siber dan Sandi Negara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris dan pandangan langsung dari para ahli cyber security yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal, skripsi, internet, laporan, serta media nasional dan internasional. Literatur yang digunakan harus relevan dan mendukung analisis dalam penelitian ini.

Dengan metode dan teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai respons kebijakan luar negeri China terhadap pemblokiran aplikasi

China oleh India. Pada penulisan ini dan meminimalkan gangguan penulis menggunakan konsep kebijakan kerahasiaan integritas, ketersediaan luar negeri serta *cyber security*. Konsep informasi yang dilindungi oleh *cyber security* tersebut digunakan untuk menjabarkan atau informasi baik yang fenomena internet censorship yang terjadi bersifat *physical attack* maupun *cyber attack* antara India dan China. (Ardiyanti, 2014).

Cyber Security

Teknologi yang semakin berkembang pesat membuat batasan antara negara tidak lagi terlihat karena fitur konektivitas, kecepatan dan kemudahan akses menyebabkan persebaran informasi yang sangat mudah. Perkembangan informasi di dunia mengakibatkan dunia tanpa batasan berdampak pada penggunaan ruang *cyber* yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut mengharuskan negara untuk mampu mengatasi berbagai ancaman nasional dalam *cyberspace* (Setyawan & Sumari, 2016).

Cyber security sendiri merupakan kumpulan teknologi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program serta data dari serangan, kerusakan serta akses yang tidak sah. Istilah *cyber security* tersebut mengacu pada praktik dan teknik yang dirancang untuk melindungi data digital. Salah satu hal yang dilakukan untuk membangun *cyber security* adalah kepastian hukum yang mencakup tentang Undang-Undang *cyber*. Mekanisme daripada *cyber security* yaitu melindungi

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri suatu negara yang mencakup tentang kepentingan nasional sebagai akumulasi daripada kepentingan masyarakat dalam bernegara. Rosenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan landasan bagi negara dalam menjalankan hubungan dengan negara lain berdasarkan fenomena eksternal yang terjadi. Salah satu kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara dalam menanggapi fenomena eksternal adalah kebijakan luar negeri dalam bentuk perilaku maupun aksi terhadap isu tersebut, dalam hal ini tanggapan ataupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh negara tersebut.

Menurut Holsti, tindakan kebijakan luar negeri salah satunya adalah diplomasi. Dimana diplomasi merupakan upaya pemerintah mengomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya untuk merasional kepentingan tersebut maka dibutuhkan ancaman, janji, kesepakatan-kesepakatan yang dapat

diterima dalam suatu isu kepada negara lain. Diplomasi pada hakikatnya merupakan proses negosiasi di mana masing-masing pemerintah melakukan tawar dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal melalui saluran-saluran resmi yang telah disepakati (Holsti, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik India China di Lembah Galwan

Lembah Galwan merupakan wilayah yang terletak di Ladakh Sektor Barat yang berdekatan dengan Aksai Chin, di mana Aksai Chin ini merupakan wilayah yang disengketakan oleh India dan China namun dikendalikan oleh China. India dan China memiliki sejarah yang cukup panjang tentang klaim teritorial yang mengalami tumpang tindih dengan luas 3.440 km atau 2.100 mil dari garis line of actual control. LAC merupakan demarkasi yang memisahkan wilayah baik yang dikuasai oleh India maupun yang dikuasai oleh China.

Pandangan India mengenai *line of control* sepanjang 3.488 km sedangkan China menganggapnya hanya sekitar 2.000 km. *Line of actual control* menjadi hal yang kontroversial di Ladakh karena India yang notabene sebagai negara bekas jajahan Inggris sedangkan perjanjian Shimla tentang garis McMahon ditandatangani oleh British India pada saat itu dan di sisi lain Aksai Chin yang

berdekatan dengan Ladakh tidak termasuk ke dalam bagian wilayah berdasarkan McMahon line meskipun wilayah tersebut meskipun wilayah tersebut merupakan wilayah yang masih dikendalikan oleh kerajaan Inggris pada saat menduduki India. Jadi garis perbatasan berdasarkan McMahon line hanya ditetapkan oleh imperialis Inggris di wilayah bagian Sektor Timur tidak untuk wilayah Sektor Barat seperti Aksai Chin. Akibat dari garis perbatasan yang tidak jelas membuat kedua negara berkonflik sampai pada hari ini.

Pada tanggal 15 Juni 2020, terjadi konfrontasi berdarah antara India dan China di wilayah Lembah Galwan yang terletak di sepanjang perbatasan Line of Actual Control (LAC) di Ladakh. Bentrokan ini menyebabkan kematian 20 tentara India dan 5 tentara China. Insiden ini merupakan akibat dari sejarah panjang perselisihan perbatasan antara kedua negara, terutama di wilayah Ladakh dan Arunachal Pradesh. Sejak Perang Sino-India tahun 1962, ketegangan perbatasan ini belum sepenuhnya mereda, dengan LAC sebagai garis pemisah *de facto* yang tidak disepakati secara konsensual oleh kedua belah pihak, menyebabkan klaim teritorial yang tumpang tindih.

Selain itu, kedua negara telah

terlibat dalam pembangunan infrastruktur lebih dari 14.000 kaki dengan medan di dekat perbatasan. India membangun jalan raya strategis (DSDBO Road) yang menghubungkan daerah Daulat Beg Oldie di Ladakh dengan daratan India. China memandang pembangunan infrastruktur ini sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap status quo. Patroli militer dari kedua belah pihak sering kali bertemu di wilayah yang dipersengketakan, yang dapat memicu konfrontasi. Pada awal Mei 2020, ketegangan meningkat ketika pasukan China dan India terlibat dalam serangkaian bentrokan kecil di sepanjang LAC, terutama di wilayah Pangong Tso dan Galwan Valley.

Rincian korban dari bentrokan ini mencakup 20 tentara India dan China mengakui kehilangan 5 tentara pada insiden tersebut. Pertemuan patroli pada malam tanggal 15 Juni 2020 di lembah sempit dekat sungai Galwan terjadi saat pasukan India berusaha memverifikasi apakah China telah mematuhi kesepakatan untuk menarik pasukannya dari wilayah yang disengketakan. Konfrontasi ini tidak melibatkan senjata api, sesuai dengan protokol yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua negara untuk menghindari eskalasi. Namun, kekerasan fisik pecah menggunakan tongkat, batu, dan senjata tumpul lainnya. Lokasi bentrokan berada di ketinggian

lebih dari 14.000 kaki dengan medan yang kasar dan kondisi cuaca yang keras, sehingga banyak korban yang jatuh atau terlempar ke dalam jurang dan sungai yang dingin akibat bentrokan tersebut.

Bentrokan antara China dan India di Lembah Galwan Ladakh merupakan hal yang terburuk yang pernah terjadi selama insiden yang telah terjadi 45 tahun yang lalu. Bentrokan berdarah yang terjadi pada 15 Juni 2020 menyebabkan India meninjau ulang kebijakan luar negeri India terhadap China. Bentrokan tersebut memberikan gagasan ketidakpercayaan India terhadap China dan persepsi bahwa hubungan antara India dan China akan tetap bermusuhan.

Hal tersebut terjadi karena pelanggaran terkait dengan perjanjian perdamaian dan orientasi kerjasama kedua negara dianggap sebagai mitra kerja yang tidak bersahabat dan pembangunan yang tidak berubah. Bentrokan yang terjadi di Lembah Galwan yang menewaskan 20 tentara militer India membuat warga India mendukung pemboikotan produk China termasuk dukungan terhadap *copyright* aplikasi China (Kedutaan Besar RTT, 2020).

Dampak dari konfrontasi ini termasuk peningkatan ketegangan

diplomasi antara India dan China. Kedua negara saling menuduh melanggar perbatasan dan protokol yang telah disepakati. India memperketat pengawasan terhadap investasi dan produk China, termasuk melarang sejumlah aplikasi asal China dengan alasan keamanan nasional.

Internet Censorship didefinisikan sebagai larangan terhadap media baik film, berita, aplikasi. *Internet censorship* merupakan kontrol terhadap akses apapun yang dipublikasikan atau yang dapat dilihat di *internet* yang dilakukan oleh regulator atas inisiatifnya. Alasan daripada *internet censorship* dapat dikategorikan sebagai alasan politik, sosial, konflik dan keamanan serta alat *internet* yang mencakup tentang *server proxy* dan sebagainya. India melakukan *internet censorship* terhadap aplikasi atas keamanan nasional.

Sensor aplikasi tersebut berdasarkan pasal 69A undang-undang teknologi informasi India tahun 2000 yang memberi arahan untuk penghapusan konten yang tidak pantas di media sosial dan situs web lainnya serta memantau informasi apapun yang dihasilkan, diterima, disimpan dan dikirim ke komputer mana yang dihasilkan, diterima, disimpan dan disimpan ke komputer manapun dan kewenangan sensor aplikasi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk memblokir

konten online demi kedaulatan, keamanan, pertahanan dan integritas India (Singh, 2020).

Kemudian alasan India untuk melakukan *internet censorship* yaitu: pemerintah mengklaim bahwa aplikasi tersebut terlibat dalam kegiatan merugikan kedaulatan India, pertahanan India serta keamanan India dan ketertiban umum. Kementerian Teknologi India memperoleh banyak keluhan dari berbagai sumber termasuk laporan tentang penyelagunaan aplikasi yang tersedia di platform Android dan IOS yang melakukan pengiriman data pengguna ke server yang berada di luar India, pertimbangan laporan dari Tim Tangkap Darurat Komputer CERT-IN banyak menerima keluhan dari warga mengenai data pengguna dan pelanggaran privasi serta aplikasi tersebut berdampak pada ketertiban umum. Pertimbangan pemerintah terkait dengan sensor aplikasi adalah langkah tepat untuk melindungi pengguna internet dan kepastian keamanan dan kedaulatan *cyberspace* untuk warga India (Khaliq, 2020).

Internet censorship terhadap aplikasi yang dilakukan oleh India tidak lepas dari kekhawatiran terhadap keamanan nasional pada *cyberspace* dan tuntutan dari Mahasiswa terhadap perlindungan privasi pada lingkup

cyberspace. Aksi dari para mahasiswa terhadap undang-undang privasi India merupakan kekhawatiran terbesar keamanan nasional terletak pada dunia maya karena banyaknya aplikasi yang meminta perizinan data untuk penggunaan aplikasi yang berdampak pada kerentanan keamanan privasi pengguna aplikasi di India (BBC, 2020).

Di sisi lain aplikasi melakukan pelacakan terhadap setiap individu terhadap aplikasi pelacakan *text*, pembelian, minat dan informasi pribadi lainnya setiap pengguna aplikasi. Berbagai perusahaan membeli data tersebut dan menganalisisnya untuk mempelajari tentang kesukaan minat pengguna, masalah kesehatan, afiliasi politik, minat belanja, sifat, dll. Perusahaan dapat menjual informasi tersebut baik kepada pemerintah, perusahaan asuransi maupun swasta, bank, pemasar, penagih utang dan kelompok lainnya yang membutuhkan data baik informasi politik, sosial, keuangan, belanja dan aktivitas komputer pengguna aplikasi.

Kemudian yang menarik adalah pengumpulan dan pelacakan data ini bersifat tidak ilegal karena pengguna ketika membuat akun ke situs tersebut harus menyetujui perjanjian persyaratan pengguna aplikasi yang mengizinkan aplikasi melacak penggunaannya. Disisi lain pemerintah berhak untuk memata-matai pengguna aplikasi melalui izin yang legal

dari undang-undang intelijen pemerintah untuk melakukan mata-mata terhadap pengguna aplikasi dan hal tersebut merupakan pelanggaran yang sangat jelas terhadap privasi warga negara. Kekhawatiran pemerintah terkait dengan distorsi yang terjadi pada layar *gadget* dan rencana *back end* China untuk membangun internet baru yang memungkinkan pencurian data apapun seperti foto, video hingga data pribadi lainnya. Jika China berhasil menduduki kendali atas sistem informasi dan telekomunikasi dunia maka mereka dapat mencuri data warga negara, memanipulasi data, memantau aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dan mengarahkan pengguna *gadget* sesuai kehendaknya karena mereka memiliki kemampuan untuk memperluas dan memaksa kehendak mereka di dunia (Zuchora & Walske, 2020).

Tanggapan China terhadap Censorship Aplikasi

Kebijakan *internet censorship* yang India terhadap China ditanggapi oleh China dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan sebagai tanggapan terhadap *censorship* tersebut. Pemerintah China dalam menanggapi *internet censorship* aplikasi yang dilakukan oleh India di mana pemerintah China menyatakan

bahwa *copyright* aplikasi merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar aturan WTO. Juru bicara kedutaan besar China di India yaitu Zhao Lijian menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan langkah diskriminasi perdagangan yang menyalagunakan aturan pengecualian daripada keamanan nasional di WTO (Zee Media Bureau, 2020).

Pemerintah China berulang kali menegaskan bahwa China menentang penggunaan “keamanan nasional” oleh India sebagai alasan *internet censorship* terhadap aplikasi yang berlatar belakang China. Praktik tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi WTO serta prinsip persaingan yang adil dalam perdagangan internasional dan sangat merusak hak-hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan China, hal tersebut juga menghambat pengembangan bisnis dan industri India itu sendiri (环球网, 2022).

Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa China sangat prihatin terkait dengan keputusan yang diambil oleh India atas *internet censorship* aplikasi yang seharusnya pemerintah India bertanggung jawab atas perlindungan hak dan kepentingan investor internasional sesuai dengan prinsip-prinsip pasar yang sah. Kementerian Luar Negeri China juga menanggapi *internet censorship* terhadap

aplikasi di India dengan menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh India termasuk tindakan yang selektif dan diskriminatif yang berlawanan dengan prosedur yang adil dan transparan dengan menyalahgunakan keamanan nasional yang melanggar aturan non-diskriminasi WTO.

Kebijakan WTO terkait dengan pembatasan internet yang disebutkan oleh China adalah prinsip-prinsip non-diskriminasi dan persaingan yang adil yang diatur dalam perjanjian WTO. Prinsip non-diskriminasi mengharuskan anggota WTO untuk tidak membedakan perlakuan antara produk domestik dan impor, serta antara produsen asing dan domestik sehingga anggota WTO tidak boleh memberlakukan kebijakan yang secara khusus merugikan produk, layanan, atau investasi asing.

Prinsip persaingan yang adil mengharuskan anggota WTO untuk tidak memberikan subsidi atau bantuan yang merugikan perdagangan antara negara anggota lainnya. Hal tersebut juga berlaku untuk tidak memberikan keuntungan yang tidak adil kepada perusahaan domestik dalam bentuk pembatasan akses pasar atau kebijakan yang menguntungkan perusahaan domestik secara tidak adil.

Meskipun belum ada laporan resmi ke WTO, China telah

menggunakan forum WTO, untuk keamanan nasional pada dunia maya menyuarakan keprihatinannya. Pada pertemuan Dewan Perdagangan Barang WTO pada Oktober 2020, China mengajukan pertanyaan kepada India mengenai dasar hukum dari pelarangan tersebut dan apakah langkah tersebut sesuai dengan komitmen India di WTO. Dalam menghadapi pelarangan aplikasi tersebut, China lebih memilih untuk mencari dialog dengan India untuk menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi bilateral, selain dari mengkritik langkah India melalui saluran diplomatik dan forum internasional.

Sedangkan India membenarkan larangan aplikasi atas dasar kebijakan untuk melindungi moral publik demi menjaga ketertiban umum, perlindungan privasi individu terkait dengan penyebaran data pribadi dan perlindungan terhadap kerahasiaan akun individu serta keamanan nasional berdasarkan pada pasal XIV tentang pengecualian diskriminasi yang diatur pada GATS (World Trade Organization, 2022).

Penggunaan internet yang meningkat juga berpotensi terhadap ancaman keamanan suatu negara pada dunia maya. Oleh karena itu, pemberlakuan *internet censorship* ialah langkah *cyber security* untuk mengurangi lalu lintas internet yang akan mengurangi kekhawatiran India terhadap ancaman

keamanan nasional pada dunia maya terletak pada perizinan data terhadap aplikasi.

Mengutip dari laporan studi yang telah dilakukan oleh Arrka *consulting* bahwasanya 50 aplikasi China meminta akses data pengguna aplikasi sebesar 45% untuk perizinan penggunaan aplikasi. Di mana 50 dari aplikasi tersebut 10 di antaranya seperti TikTok, Helo, Shareit, UC Browser dan aplikasi lainnya merupakan aplikasi populer di India. Aplikasi tersebut selain meminta akses data individu juga meminta akses kamera dan mikrofon serta akses yang tidak diperlukan seperti lokasi, profesi, daftar teman, minat, foto yang mungkin disukai, dll. Hal tersebut merupakan privasi terpenting bagi pengguna aplikasi (Bhandari, Fernandes, & Agarwal, 2020).

Terkait dengan penambahan data yang dilakukan oleh aplikasi maka India beranggapan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut merupakan *cyber attack* dalam bentuk *malware spyware*. Malware tersebut melacak aktivitas yang dilakukan oleh pengguna aplikasi yang melakukan aktivitas online. *Spyware* tersebut merupakan salah satu jenis *malware* yang dirancang untuk memantau pengguna aplikasi dengan memata-matai kebiasaan pengguna internet, melacak

akun dan kata sandi pengguna serta mengambil informasi data untuk dijual ke pasar gelap. Membuat akun pada aplikasi membutuhkan data pribadi seperti nama pengguna, alamat, nomor, email, lokasi, dll. Hal tersebut diberikan kepada aplikasi sehingga aplikasi dapat melihat pergerakan pengguna.

Ketika pengguna aplikasi mendownload aplikasi dari *playstore* maka untuk menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi membutuhkan akses pengguna seperti kamera, mikrofon, lokasi maka aplikasi dapat melihat pengguna karena perizinan kamera dan aplikasi dapat mendengar percakapan pengguna karena ada perizinan microphone. Data tersebut digunakan oleh aplikasi untuk menganalisis data pengguna maka mereka akan mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh pengguna aplikasi dan hal tersebut sangat bermanfaat untuk periklanan dan data tersebut dijual ke berbagai rezim yang membutuhkan data tersebut (Singh N. K., 2022).

Kemudian ketenggangan perbatasan antara India dan China juga merupakan salah satu perkara yang membuat India cukup bersifat skeptis terhadap China atas ketidakamanan data-data warga India yang telah ditransfer ke pemerintah China melalui aplikasi China. Di sisi lain china terkenal sebagai negara yang menggunakan kekuatan perusahaannya dalam bidang intelijen dan hal tersebut

cukup membuat pemerintah India menganggap bahwa ancaman keamanan nasional tidak hanya terletak pada darat namun juga *cyber* (Raza & Shekhar, 2020).

Internet censorship merupakan hak prerogatif dari suatu negara. India berhak untuk melakukan kebijakan censorship terhadap aplikasi China maupun aplikasi dari negara manapun berdasarkan bagian 69A Undang-Undang Teknologi Informasi India tahun 2000 yang berisi tentang kekuasaan untuk mengeluarkan arahan untuk memblokir akses publik atas informasi apapun melalui sumber daya komputer apapun. Oleh karena itu, India dalam menanggapi ancaman dunia maya menciptakan undang-undang IT dan *Internet censorship* yang dilakukan oleh India merupakan praktik *cyber security* yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer serta data pengguna internet itu sendiri (Khurniawan, 2022).

India juga merupakan pengguna aplikasi terbesar China seperti TikTok, UC Browser, Shareit dan aplikasi populer lainnya serta aplikasi tersebut tidak asing diberbagai kalangan masyarakat India. Hal tersebut memberikan akses yang mudah bagi China untuk melakukan strategi penambangan data. Di sisi lain China juga dikenal dengan negara penyerang

cyber nomor satu di dunia yang internasional, kebijakan luar negeri disponsori oleh pemerintah dan serangan tersebut tidak dapat dianggap sepele karena mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, India bisa mengkalim pengecualian kebijakan non-diskriminasi dengan tujuan melindungi keamanan nasional. Oleh karena itu, India dapat mengklaim pengecualian dari kewajiban perdagangan non-diskriminasi dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional.

Disisi lain, hal tersebut digunakan oleh pemerintah China dalam menanggapi perlindungan moral dan priasi publik. Namun, klaim pelanggaran India terhadap perjanjian non-diskriminasi jika di bawah ke WTO oleh China, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara realistis mengingat bahwa China sendiri merupakan rezim proteksionis data, di sisi lain akan merugikan pembelaannya sendiri karena memiliki undang-undang intelijen nasional. Sampai sejauh ini India dan China masih berfokus pada penyelesaian masalah perbatasan dan kasus *copyright* aplikasi belum dibawa ke ranah WTO oleh China (Priety & Goyal, 2021).

Kebijakan Luar Negeri

Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan luar negeri merupakan aktualisasi dari kebijakan luar negeri suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam ranah

internasional, kebijakan luar negeri dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk berbaur dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, dalam mencapai kepentingan nasional China terhadap India maka kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh China sebagai berikut:

Fokus pada permasalahan krisis Perbatasan dengan India

Bentrokan mematikan antara tentara India dan China yang terjadi pada 15 Juni 2020 di Lembah Galwan, bentrokan tersebut merupakan bentrokan dalam empat puluh lima tahun menandai perubahan baru terhadap hubungan India dan China yang tidak menyenangkan. Bentrokan tersebut membuat kemarahan publik terhadap China di India sampai berujung pada sentimen anti China *copyright* aplikasi-aplikasi China. Dalam menanggapi kebijakan yang dilakukan oleh India pasca bentrokan di Lembah Galwan, China menempatkan strategi kebijakan luar negerinya terhadap krisis perbatasan yang sedang berlangsung antara China dan India.

Meskipun belum ada kesepakatan antara India dan China untuk India mempertimbangkan kepentingan nasional China, strategi yang dilakukan oleh China adalah perlu mencegah

perpecahan total terhadap hubungan China India agar tidak menjadi negara musuh. China melakukan negosiasi terkait dengan perbatasan karena adanya kesadaran bahwa hubungan dengan India merupakan hubungan yang penting. China beranggapan bahwa untuk mengelola hubungan dengan India dengan baik maka India tidak akan sepenuhnya berinvestasi pada Amerika Serikat dan situasi keamanan perbatasan baik di darat maupun di Laut Barat China akan meningkat secara signifikan (Zhihui, 2020). Namun, ketika hubungan antara India dan China rusak dan tidak dapat diperbaiki maka hubungan antara India itu sendiri dapat menjadi masalah baru yang tidak ada habisnya karena bermusuhan dengan India membuat India memperkuat sentimen anti China (北京大学区域与国别研究院, 2020).

Mencegah Permusuhan Total dengan India

Strategi yang dilakukan oleh China adalah memperbaiki hubungan dengan agar tidak mendorong India jatuh ke kubu Amerika Serikat karena jika Amerika Serikat dan India membangun hubungan ekonomi yang sangat kuat, hal tersebut dapat mengakibatkan China kehilangan posisinya diberbagai bidang industri di India (Yucheng, 2020).

Memperbaiki hubungan dengan India merupakan tekanan dari masyarakat

China itu sendiri dan hal tersebut terjadi karena hubungan antara Amerika Serikat dan China juga tidak membaik, di sisi lain hubungan antara India dan China terkait dengan perbatasan menyebabkan beberapa dampak pada bidang ekonomi. Terkait dengan censorship aplikasi China yang dilakukan oleh India sejauh ini belum ada negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan antara China dan India untuk mempertimbangkan kepentingan China pada bidang teknologi di India. Tetapi strategi yang dilakukan oleh China adalah mencegah permusuhan total terhadap hubungan India dan China dan tidak menginginkan India untuk menjadi musuh (Hailin, 2020).

China percaya bahwa jika memperoyeksikan China sebagai musuh maka hal tersebut akan memberikan sinyal kepada negara-negara yang bermusuhan dengan China seperti Amerika Serikat bahwa perbatasan barat daya tidak stabil. Oleh karena itu strategi yang diambil oleh China adalah bijaksana memperlakukan India sebagai negara mitra dalam bidang-bidang tertentu dan tidak menganggap India sebagai musuh sekalipun memiliki masalah pada perbatasan (Hailin, 2020).

Tetap Menjadikan India Sebagai Negara Mitra

Pasca bentrokan di Lembah

galwan para ahli strategi geopolitik Asia Selatan terkemuka China seperti Zhang Jiadong, Ye Hailin, Hu Shusheng serta Lou Chunhao menganjurkan hubungan India dan China dengan model baru yang memprioritaskan hubungan normal antara kedua negara dengan tetap menjadikan India sebagai negara mitra dan tidak menganggapnya sebagai negara musuh. Dimana konfrontasi yang terjadi pada perbatasan dengan India dijadikan hal yang normal dan akan ada kemungkinan bahwa perbatasan butuh waktu panjang untuk *line of actual control* yang menjadi garis merah perbatasan.

Terlepas dari masalah perbatasan kedua negara yang tidak stabil antara India dan China, kedua negara sebisa mungkin berusaha untuk tetap mempertahankan ikatan normal untuk mempertahankan serta memperluas kerjasama yang diperlukan. China menganggap hubungan yang stabil dengan India merupakan kebutuhan yang lebih besar bagi China daripada strategi non-kerjasama yang lebih merugikan China (Singh A. G., 2022).

Strategi Kebijakan Luar Negeri China

China meminta untuk memisahkan sengketa perbatasan dengan bisnis tetapi India mempertegas bahwa status quo ante tidak akan dipulihkan di perbatasan (Singh A. , 2021). China secara terbuka berusaha untuk menjalin hubungan

ekonomi seperti biasa, hal tersebut terlihat dari Wang Yi sebagai Menteri Luar Negeri China menyerukan agar masalah perbatasan di tempatkan ditempatkan pada tempatnya tanpa melibatkan hubungan ekonomi. Pasca bentrokan berdarah di Lembah Galwan kebijakan yang diambil oleh China terhadap India adalah melakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi dengan India terkait dengan perbatasan di Lembah Galwan (Ahmed, Mirza, Ali, & Rahman, 2020). Terkait dengan strategi kebijakan luar negeri China terhadap India dalam menangani permasalahan maka dibutuhkan negosiasi kedua negara tersebut, di mana China dan India sepakat dalam melakukan negosiasi melalui jalur diplomatik dan negosiasi jalur militer.

Negosiasi Diplomatik

Terkait dengan negosiasi yang dilakukan oleh diplomatik kesepakatan kedua belah pihak pada perundingan pertemuan ke-20 sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak tidak menginginkan perbedaan menjadi perselisihan, oleh karena itu harus mengambil pedoman para pemimpin dalam mengembangkan kedua negara.
- b. Situasi perbatasan merupakan masalah kedua negara, oleh karena itu pasukan kedua negara harus melanjutkan dialog, cepat melepaskan diri, menjaga jarak dengan tepat serta

meredakan ketegangan.

c. kedua belah pihak akan melanjutkan mekanisme komunikasi melalui perwakilan khusus mekanisme komunikasi melalui mekanisme konsultasi kerja dan koordinasi di bidang perbatasan akan tetap berlanjut.

d. Kedua belah pihak harus mematuhi semua perjanjian dan protokol yang ada tentang urusan perbatasan China dan India serta menjaga perdamaian dan ketenangan pada daerah perbatasan dan menghindari tindakan apapun yang dapat meningkatkan masalah.

e. ketika situasi mereda maka kedua belah pihak harus mempercepat kerja untuk menyimpulkan langkah-langkah pembangunan kepercayaan baru untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian serta ketenangan di daerah perbatasan (Hindustan Times, 2020).

Pertemuan antara Menteri Luar Negeri India dan China di Moskow pada September 2020 menghasilkan keputusan kedua negara untuk menarik pasukan dari Lembah Galwan dan Danau Pangong. Kedua negara mengupayakan untuk kembali membangun hubungan berdasarkan prinsip *pancshell*. China menyatakan bahwa siap untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua negara terkait dengan masalah perbatasan dengan cara negosiasi dan konsultasi. Kedua belah pihak harus menempatkan masalah perbatasan pada posisi yang tepat

dengan melakukan kerjasama bilateral yang positif dan menciptakan kondisi yang menguntungkan antara kedua belah pihak serta menyelesaikan perbedaan pendapat melalui negosiasi (Embassy of the People's Republic of China in the Republic of India, 2021).

Kemudian pada pertemuan ke-23 kedua belah pihak sepakat untuk mengurangi ketegangan di perbatasan dan berusaha untuk menyelesaikan sengketa. Pada pertemuan ke-23 kedua belah pihak sepakat untuk tetap menjaga dialog dan komunikasi melalui saluran diplomatik dan militer terkait dengan kelanjutan urusan perbatasan dan kedua belah pihak sepakat mempersiapkan pertemuan komandan senior putaran ke-14 (Embassy of the People's Republic of China in the Republic of India, 2021).

Kesepakatan pembicaraan militer dan diplomatik antara India dan China terkait dengan perbatasan di mana India dan China melakukan penarikan militer dari tepi Utara dan Danau Pangong Selatan, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan tentang penarikan militer kedua negara (Siddiqui, 2021). Dua tahun setelah bentrokan kedua negara menjalin negosiasi melalui militer dengan putaran 15 dan perundingan tersebut dianggap positif dan konstruktif karena kedua belah pihak sepakat untuk tetap

melakukan negosiasi tanpa campur tangan pihak ketiga. Sampai sejauh ini kedua negara masih melakukan dialog seputar tentang penyelesaian konflik perbatasan di Ladakh (Madan, 2020).

Negosiasi militer dan diplomasi antara India dan China pada konflik Lembah Galwan merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ketegangan dan mencari solusi damai terhadap perselisihan perbatasan mereka. Meskipun belum mencapai penyelesaian yang memuaskan sepenuhnya, kedua negara terus berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Kedua negara berusaha menjaga saluran komunikasi terbuka untuk mencegah miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.

Meskipun konflik perbatasan antara India dan China di wilayah Lembah Galwan, telah mereda sejak puncaknya pada tahun 2020, pelarangan aplikasi China di India masih berlanjut hingga saat ini. Konflik perbatasan tersebut, yang mencapai titik kritis pada Juni 2020 dengan bentrokan berdarah di Lembah Galwan, telah melihat upaya dari kedua negara untuk menormalkan hubungan dan mengurangi ketegangan.

Di satu sisi, upaya diplomasi dan negosiasi militer telah membantu mengurangi eskalasi konflik perbatasan. Kedua negara telah berusaha membangun

saluran komunikasi yang lebih baik dan mencari solusi damai untuk mengelola perselisihan perbatasan mereka. Meskipun demikian, ketegangan tetap ada, dan kedua negara tetap waspada terhadap potensi eskalasi yang bisa terjadi.

Di sisi lain, pelarangan aplikasi China oleh India merupakan respons atas konflik perbatasan dan juga didasarkan pada alasan keamanan nasional dan privasi data. India melihat aplikasi China sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasionalnya, terutama setelah insiden di Lembah Galwan. Pelarangan ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi India untuk mengurangi ketergantungannya pada produk dan layanan digital asal China.

Dengan demikian, sementara konflik perbatasan telah mereda, pelarangan aplikasi China oleh India masih menjadi isu yang berkelanjutan, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kedua negara. Upaya terus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengelola ketegangan ini, namun dampaknya terhadap hubungan bilateral dan dinamika regional tetap menjadi fokus perhatian.

Tabel

Berikut peneliti melampirkan table terkait dengan *censorship* aplikasi China di India sebagai acuan data yang

digunakan untuk meneliti.

Tabel 1.1 aplikasi yang di-censorship pada 29 Juni 2020

No.	Aplikasi	No.	Aplikasi	No.	Aplikasi
1	TikTok	21	UCNews	41	SelfieCity
2	Shareit	22	QQMail	42	DU Browser
3	Kwai	23	Weibo	43	Baidu Translate
4	UC Browser	24	Xender	44	Cam Scanner
5	Baidu map	25	QQMusic	45	Vmate
6	Shein	26	QQNewsfeed	46	Wonder Camera
7	Clash of Kings	27	Bigo Live	47	Photo Wonder
8	DU battery saver	28	YouCam makeup	48	QQ Security Center
9	Helo	29	Mail Master	49	WeMeet
10	Likee	30	Paraller Space	50	Sweet Selfie
11	Cache Cleaner DU App studio	31	Mi Video Call-Xiaomi	51	Hago Play With New Friends
12	Mi community	32	WeSync	52	QQ International
13	CM Browsers	33	ES File Explorer	53	Clean Master-Cheetah Mobile
14	Virus Cleaner	34	Viva Video-QU Video Inc	54	QQ Launcher
15	APUS Brower	35	Meitu	55	QQ Player
16	ROMWE	36	Vigo Video	56	U Video
17	Club Factory	37	New Video status	57	Vfly Status Video
18	Newsdog	38	DU Recorder	58	Mobile Legends
19	Beauty Plus	39	Vault-Hide	59	DU Private
20	WeChat	40	DU Cleaner		

1.3 Aplikasi China yang populer di India

No	Aplikasi	Kategori Aplikasi	Pengguna Aktif bulanan di India	Pengguna Global
1	TikTok	Layanan jejaring sosial berbagi Video	200 juta	500 juta
2	Bigo Live	Aplikasi live streaming	60 juta	100 juta
3	Helo	Platform media sosial untuk membuat, mengunggah, dan berbagi konten	50 juta	100 juta
4	Liveme	Aplikasi video streaming langsung	40 juta	200 juta
5	Likee	Aplikasi pembuat video dan editor video	115,8 juta	500 juta
6	Snack Video	Aplikasi pembuat video singkat untuk status	190 juta	331 juta
7	Vmate	Platform berbagi video pendek	50 juta	100 juta
8	PUBG	Game Online	180 juta	555 juta
9	Shareit	Aplikasi berbagi file (foto, video, film dan kontak)	400 juta	1 miliar
10	Xender	Aplikasi berbagai file yang memiliki kecepatan 40mb/s dari Shareit dengan kecepatan 20mb/s	170 juta	500 juta
11	Club Factory	Aplikasi e-commerce fashion, lifestyle dan produk kecantikan	100 juta	425 juta
12	CamScanner	Aplikasi untuk memindai gambar	100 juta	400 juta
13	BeautyPlus	Kamera selfie dan pengedit foto	100 juta	800 juta
14	UC Browser	Aplikasi internet seluler (kemampuannya menjangkau koneksi 2G dengan cepat dan menghemat data 79% dari google chrome)	130 juta	500 juta
15	WeChat	Media sosial (obrolan, panggilan dan pembayaran seluler)	200 juta	1 miliar

Tabel 1.2 aplikasi yang di-censorship 24 November 2020

No	Aplikasi	No.	Aplikasi
1	AliExpress- Smarter Shopping, Better Living	23	ChinaLove: Dating App for Chinese Singles
2	CamCard- Business Card Reader	24	WeWorkChina
3	Free Dating App-Singol, Start Your Date!	25	WeTV-TV Version
4	Lalamove India- Delivery App	26	AsianDate: Find Asian Singles
5	Soul- Follow the Soul to find you	27	Rela- Lesbian Social Network
6	CamCard- BCR (Western)	28	First Love Live-Super Hot Live Beauties Live Online
7	Drive with Lalamove India	29	Guys Only Dating: Gay Chat
8	Snack Video	30	Tubiit: Live Streams
9	Chinese Social- Free Online Dating Video App & Chat	31	CashierWallet
10	Date in Asia- Dating & Chat for Asian Singles	32	MangoTV
11	WeDate-Dating App	33	MGTV-HunanTV official TV App
12	Alipay Cashier	34	DteMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online
13	AliSuppliers Mobile App	35	Adore App
14	Alibaba Workbench	36	TrulyAsian
15	Lucky Live-Live Video Streaming App	37	Isoland 2: Ashes of Time
16	BoxStar (Early Access)	38	Jellipop Match- Decorate Your Dream Island!
17	Conquista Online II	39	Munchkin Match- Decorate Your Dream Island
18	DingTalk	40	Munchkin Match: Magic Home Building
19	Happy Fish	41	Taobao Live
20	Heroes Evolved	42	Snack Video
22	Identity V	43	WeTV- Cdrama, Kdrama&More

KESIMPULAN

Konflik India-China di Lembah Galwan merupakan bagian dari sejarah panjang perselisihan perbatasan kedua negara. Bentrokan berdarah pada Juni 2020 di Lembah Galwan mencerminkan ketegangan yang belum mereda sejak Perang Sino-India 1962, di mana *Line of Actual Control* (LAC) menjadi demarkasi yang tidak disepakati. India memperkuat infrastruktur di wilayah perbatasan, seperti DSDBO Road, yang dianggap sebagai ancaman oleh China. Konfrontasi fisik di Lembah Galwan menewaskan tentara dari kedua belah

pihak dan memicu reaksi keras di India, termasuk pemboikotan produk China dan penegakan sensor aplikasi China sebagai langkah perlindungan keamanan nasional.

Dampaknya meliputi peningkatan ketegangan diplomatik di mana India melarang aplikasi China dan meningkatkan pengawasan terhadap investasi China. India menggunakan undang-undang teknologi informasi untuk memblokir aplikasi yang dianggap mengancam keamanan nasional, sementara China menanggapi kebijakan India melanggar prinsip non-diskriminasi WTO. Disisi lain China mencoba memperbaiki hubungan dengan India untuk mencegah perpecahan total, menganggap langkah India sebagai tindakan diskriminatif yang merugikan perusahaan China.

Kebijakan luar negeri China terhadap India menekankan pentingnya menjaga hubungan normal dan tidak menganggap India sebagai musuh, meskipun sengketa perbatasan tetap menjadi isu sensitif. China menekankan pentingnya hubungan ekonomi dengan India dan menghindari konfrontasi yang lebih merugikan. Negosiasi diplomatik dan militer antara kedua negara menjadi langkah penting dalam menangani konflik perbatasan dan upaya mempertahankan hubungan yang stabil. Meskipun konflik perbatasan antara India dan China di wilayah Lembah Galwan, telah mereda sejak puncaknya

pada tahun 2020, pelarangan aplikasi China di India masih berlanjut hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, T., Mirza, S., Ali, S., & Rahman, W. (2020, Oktober). Face-off Between India and China in Galwan Valley: an Analysis of Chinese Incursions and Interest. 2(III Jul-Sep 2020.). Diakses pada Juni 23, 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/345079252_Face-off_between_India_and_China_in_Galwan_Valley_An_Analysis_of_Chinese_Incursions_and_Interests
- Ardiyanti, H. (2014). Cyber Security dan Tantangan Pengembangan di Indonesia. *journal DPR*. Diakses pada Maret 25 ,2020, dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/336/270>
- BBC. (2020, November 25). Aliexpress: India Continues to Ban China Apps Amid Standoff. Diakses pada April 05, 2022, dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55068372>
- Bhandari, A., Fernandes, B., & Agarwal, A. (2020). *Chinese Investment in India*. Gateway House Indian Council on Global relations. Diakses pada April 2022, 2022, dari https://www.gatewayhouse.in/wp-content/uploads/2020/03/Chinese-Investments-in-India-Report_2020_Final.pdf
- Bureau, A. N. (2020, Desember 25). Year Ender 2020: Dari Boycotting Brands To Apps; India's Response To China Post Galwan Valley Attack. Diakses

- pada Oktober 30, 2021, dari <https://news.abplive.com/news/year-ender-2020-dari-boycotting-brands-to-apps-indias-response-to-china-post-galwan-valley-attack-1421519>
- Cisomag. (2019, Oktober 28). India to Get a New Cybersecurity Policy. Diakses pada Oktober 29, 2021, dari <https://cisomag.eccouncil.org/india-cybersecurity-policy/>
- Embassy of the People's Republic of China in the Republic of India. (2021). China and India Hold the 23rd Meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on Border Affairs. *Embassy of the People's Republic of China in the Republic of India*. Diakses pada Juni 26, 2022, dari http://in.chinaembassy.gov.cn/eng/zywl/202111/t20211118_10449994.htm
- Embassy of the People's Republic of China in the Republic of India. (2021). Wang Yi Meets with Indian External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar. *Embassy of the People's Republic of China in the Republic of India*. Diakses pada Juni 27, 2022, dari https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxx_x_662805/202207/t20220708_10717362.html
- Ghosh, D. (2020, November 25). China Accuses India Of "National Security Excuse" To Block Its Apps. Diakses pada November 25, 2020, dari <https://www.ndtv.com/india-news/china-says-it-resolutely-opposes-indias-move-to-block-more-of-its-mobile-apps-2329884>
- Hailin, Y. (2020, November 27). Dampak Bias Identitas terhadap Prospek Hubungan Tiongkok-India. Diakses pada Juni 23, 2022, dari http://ex.cssn.cn/gjgxx/gj_ytqy/202007/t20200730_5163496.html
- Hindustan Times. (2020, September 11). India, China Agree on 5-Point Plan for Resolving Border Standoff. Diakses pada Juni 26, 2022, dari <https://www.hindustantimes.com/india-news/india-china-agree-on-5-point-plan-for-resolving-border-standoff-here-s-what-you-need-to-know/story-ZoxC1MNSZcQxIRN467YEOK.html>
- Holsti. (1990). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. Diakses pada April 26, 2022
- Homairah, U. (2015, Juli 06). Kepentingan Dalam Kerjasama Pertahanan Dengan Tiongkok Pada Tahun 2013 Terkait Persoalan Di Perbatasan. Diakses pada Januari 12, 2022
- Kedutaan Besar RTT. (2020, Agustus 18). Speech by Ambassador Sun Weidong at the China India Youth Webinar. Diakses pada Juni 22, 2022, dari <https://bit.ly/2Z3HtYT>
- Khaliq, R. U. (2020, Juni 30). User Data Not Shared with China: TikTok After India Ban. Diakses pada Maret 29, 2022, dari <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/user-data-not-shared-with-china-tiktok-after-india-ban/1894708>
- Khurniawan, M. T. (2022, April 20). Apa Pendapat Bapak Mengenai Kebijakan Internet Censorship Terhadap Aplikasi China di India? (Salmiati, Interviewer) Jakarta, Jakarta, Indonesia. Diakses pada Juni 24, 2022
- Madan, T. (2020, September 09). Emerging Global Issues: The China-India Boundary Crisis and its Implications. Diakses pada Juni 22, 2022, dari <https://www.brookings.edu/testimonies/emerging-global-issues-the-china-india-boundary-crisis-and-its-implications/> pada 22 Juni 2022.
- McKenzie, T. M. (2017, Januari 01). What is a Cyber Attack? Diakses pada Maret 22, 2021, dari

- <http://www.jstor.com/stable/resrep13817.7>
- NKD, F. (2019, September 24). Pengertian Spyware dan 4 Contoh Jenis Serangannya. Diakses pada Juni 14, 2022, dari <https://www.logique.co.id/blog/2019/09/24/pengertian-spyware/>
- Pranoto, B. K. (2018, 10 18). Diakses pada Januari 26, 2022, dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11796>
- Priety, A., & Goyal, R. (2021, Januari 13). Diakses pada Juni 25, 2022, dari IndiaCorpLaw: <https://indiacorplaw.in/2021/01/chinascla-concerning-app-ban-under-international-investment-and-trade-law-part-i.html>
- Raza, M. R., & Shekhar, R. (2020, Juli 20). *Indian BAN on Chinese Apps: Does the Move Contradict WTO Rules?* Diakses pada Juni 26, 2022, dari <https://www.jurist.org/commentary/2020/07/raza-shekhar-india-wto-apps/>
- Setyawan, D. P., & Sumari, A. D. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity Melalui ASEAN Regional Forum On Cybersecurity Initiatives. *Jurnal Penelitian Politik* . Diakses pada April 2021
- Siddiqui, H. (2021, April 20). China Refuse to Vacate Four Friction Points in Ladakh; Here's Everything You Need to Know About Gogra and Hot Springs. Diakses pada Mei 22, 2022, dari <https://www.financialexpress.com/defence/china-refuses-to-vacate-four-friction-points-in-ladakh-heres-everything-you-need-to-know-about-gogra-and-hot-springs/2236611/>
- Sikorski, M., & Honig, A. (2012). *Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software*. San Francisco: Library of Congress Catalog in Publication Data. Diakses pada Maret 25, 2021
- Singh, (2020, Juni 30). What is Section 69A in the Information Technology Act 2000? Diakses pada Mei 14, 2022, dari <https://www.jagranjosh.co/general-knowledge/section-69a-in-theinformation-tecnology-act-1593517570-1>
- Singh, A. (2021). The China-India Dispute and its Geopolitical Implications, *The Yale Review of International Studies*. Diakses pada Juni 22, 2022, dari <http://yris.yira.org/comments/4677>
- Singh, A. G. (2022, Mei 04). China's Evolving Strategic Discourse on India. . Diakses pada Juni 02, 2022, dari <https://www.stimson.org/2022/chinas-evolving-strategic-discourse-on-india/>
- Singh, H. (2020, Juli 06). What is the Panchsheel Agreement Between India and China? Diakses pada Januari 15, 2022, dari <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-is-the-panchsheel-agreement-1594012740-1>
- Singh, N. K. (2022, April 20). Bagaimana aplikasi yang disensor dapat berdampak pada keamanan nasional? (Salmiati, Interviewer, & Salmiati, Translator) New Delhi, New Delhi, India. Diakses pada Juni 15, 2022
- Statista. (2022, Juli 26). Countries with the highest number of internet users 2022. Diakses pada Oktober 28, 2021, dari <https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/>
- Vardhman, R. (2021, Februari 04). TikTok Users in India - (Statistics & Facts) 2021. Diakses pada Oktober 29, 2021, dari <https://findly.in/tiktok-users-in-india-statistics/>
- Weidong, H. S. (2020, Maret 31). 70

- Years of Diplomatic Relations between China and India [1950-2020]. Diakses pada Januari 26, 2022, dari <https://www.thehindu.com/brandhub/70-years-of-diplomatic-relations-between-china-and-india-1950-2020/article31219737.ece>
- World Trade Organization. (2022). General Agreement on Trade in Services. Diakses pada Juni 25, 2022, dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
- Yucheng, L. (2020, Juli 30). Deputy Foreign Minister Talks About "Wolf Soldier Diplomacy". "Enemies dari Every Side" and "Authoritarianism". . Diakses pada Juni 23, 2022, dari https://www.guancha.cn/politics/2020_12_05_573594.shtml
- Zee Media Bureau. (2020, Juni 30). Strongly Concerned, Verifying the Situation: China on India Banning Chinese Apps. Diakses pada Mei 19, 2022, dari <https://zeenews.india.com/india/strongly-concerned-verifying-the-situation-china-on-india-banning-chinese-apps-2292765.html>
- Zhihui, R. (2020, Oktober 09). Zheng Yongnian: Kebangkitan Idnia belum Tentu Buruk untuk India. Diakses pada Juni 23, 2022, dari <https://www.fx361.com/page/2020/1009/7078716.shtml>
- Zuchora, C., & Walske. (2020). *USA Today's Debate: Voice and Perspectives Ser.: Internet Censorship: protecting Citizens or Tampling Freedom?* (Twenty first century book ed.). USA: Library Binding. Diakses pada April 23, 2022
- 北京大学区域与国别研究院. (2020, Oktober 09). 面对中印边境冲突 · 中国如何做好危机管理. Diakses pada Juni 22, 2022, dari https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7896509
- 环球网. (2022, Februari 15). 又下黑手！以所谓“安全威胁”为由，印度再禁 54 款中国 APP. Diakses pada Juni 18, 2022, dari <https://finance.sina.com.cn/world/gjcj/2022-02-15/doc-ikyamrno0804868.shtml>
- Agrawal V., & Sharma P., (2019, 01 04). Internet Censorship in India. Diakses dari SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3309268 pada 18 Juni 2024.
- Mukhopadhyay D., & Internet Freedom Foundation., (2020, 12 07). diakses dari <https://ia801700.us.archive.org/4/items/policy-brief-internet-censorship-in-india/Policy%20Brief-%20Internet%20Censorship%20in%20India%20%28Oct%202020%29.pdf> pada 17 Juni 2024.
- Dubye S., (2021). Legality of Apps Ban in India. National Journal of Cyber Security Law. 2582-9750). Vol. 4, Issue 2, 2021. DOI: 10.37591/NJCSL. <http://lawjournals.celnet.in/index.php/njcsl/index>.
- Baqi A. M., (2022). Strategi Soft Balancing India dalam Pemblokiran Aplikasi aplikasi China. Indonesian Journal of International Relations (2022). DOI: 10.32787/ijir.v6i2.399.
- Mishra M., Yan P., & Schroeder R. (2022). TikTok Politics : Tit for Taton the India - China Cyberspace Frontier. International Journal of Communication (2022). 16814-839.